

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN BATASAN DAN ANGGAPAN**

Dalam perencanaan dan perancangan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, terdapat hal-hal yang diluar kemampuan dan wewenang arsitek, sehingga untuk membantu dan mempercepat penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan bangunan diperlukan kesimpulan, batasan dan anggapan.

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data primer dan data skunder yang telah diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Pengertian kantor DPRD Provinsi Bengkulu adalah suatu wadah/tempat aktivitas anggota Dewan serta sekretariat dewan sebagai badan legislatif daerah Provinsi Bengkulu.

1. Visi dan misi kantor DPRD Provinsi Bengkulu adalah sebagai badan Legislatif yang mempunyai fungsi kontrol yaitu mengawasi jalannya Pemerintahan serta sebagai wadah aspirasi masyarakat (fungsi perwakilan).
2. Susunan Organisasi dan tugas wewenang anggota Dewan Provinsi Bengkulu menjadi acuan dalam penentuan ruang-ruang kerja yang dibutuhkan.
3. Perencanaan dan Perancangan kantor DPRD Provinsi Bengkulu memerlukan berbagai pendekatan baik fisik maupun non fisik untuk mendukung terwujudnya suatu kantor DPRD Provinsi.

#### **3.2 Batasan**

Batasan-batasan pembahasan pada perencanaan dan perancangan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan mengenai kondisi lahan, perhitungan struktur tanah, serta kondisi daya dukung tanah tidak akan dibahas secara mendetail dalam lingkup ini.
2. Besaran luas ruang-ruang bangunan yang merupakan tuntutan kebutuhan ruang hasil studi kasus dan wawancara dengan pihak terkait dapat

digunakan sebagai acuan dalam strategi perancangan, disamping standar ruang untuk Kantor DPRD yang ideal atau yang telah ditentukan.

3. Perencanaan dan perancangan hanya meliputi masalah-masalah Arsitektural. Masalah-masalah diluar disiplin ilmu Arsitektur seperti perhitungan struktur bangunan dan lain-lain tidak akan dibahas secara mendalam.

### **3.3 Anggapan**

Beberapa anggapan yang muncul pada proses perencanaan dan perancangan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu ini adalah :

1. Studi yang telah dilakukan oleh instansi terkait mengenai kondisi Provinsi Bengkulu saat ini dianggap relevan untuk dijadikan acuan dalam pedoman merancang.
2. Semua permasalahan yang menyangkut pembiayaan pembuata bangunan dianggap tersedia.
3. Jaringan Utilitas dan sarana infrastruktur direncana lokasi dan tapak dianggap tersedia dengan kondisi baik dan dapat dikembangkan sesuai perancangan.
4. Permasalahan menyangkut pembebasan tanah untuk rencana lokasi dan tapak dianggap tidak ada permasalahan.
5. Lokasi tapak dianggap bebas bangunan tanpa terkait dengan keberadaan bangunan existing yang telah ada.